

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Adnyani, Ni Ketut Sari. 2021. Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 7 No. 2,
- Afrialdo, Masrizal. 2016. Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh, *JOM Fakultas Hukum* Vol. 3 No. 2.
- Angkasa. 2021. Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi, *Jurnal USM Law Review* Vol 4 No 1.
- Ariadi, Toni. 2009. Diskresi Kepolisian Dalam Perspektif Penegakkan Hukum, Kasubdit Fasharkan Dit Pol Air, Jakarta.
- Asikin, Zainal. 2006. pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badaruddin, Sukri. 2020. Penanganan Unjuk Rasa Di Kaji Dalam Sudut Pandang Yuridis, *Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Baihaki, Eki. 2009. Dialektika Polisi, Masyarakat Dan Komunikasi, Unpad Press.
- Basri, Hasan. 2000. Hak Asasi Manusia dan Kedudukannya di Muka Hukum Menurut KUHP, Tinjauan hukum Islam Terhadap Pasal 50 s.d 68 KUHP.
- Black, Donald J. 1972. *The Boundaries of Legal Sociology*, The Yale Law Journal 81.
- Black, Henry Cambell. 1979. *Black's Law Dictionary with Pronunciations*, Fifth Edition, West Publishing & Co. USA.
- Ding, Dimianus. 2014. Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 02 No. 02.

- DL, Chrysnanda. 2002. Diskresi dan Korupsi, Jurnal Polisi Indonesia.
- Faal, M. 1991. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Gamer, Bryan A. 1999. Black's Law Dictionary, Seventh Edition, West Group, ST.PAUL, MINN.
- Gilang, 2019, Penerapan diskresi kepolisian yang tidak dapat dituntun didepan hukum, Tahang.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Hamid, H. Hamrat, dan Harun M.Husein, 1992. pembahasan permasalahan KUHAP bidang penyidikan, Jakarta: sinar grafika.
- Hamzah, Andi. 2006. Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 1998. pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Jakarta, Pustaka kartini cetakan ke-2.
- Hidayat, Iman. 2011. Fungsi Dan Wewenang Polri Dalam Kaitanya Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Jurnal Lex Spesialis, No. 14.
- Kunarto. 2000. Polisi dan HAM, Cipta Manunggal, Jakarta
- Lemdiklat Pori., 2022. Bahan Ajar Fungsi Tekhnis Sabhara untuk Siswa Pendidikan dan Pembentukan Polri. Jakarta Lembaga Pendidikan dan Latian Polri.
- Lemdiklat Polri, 2022. Bahan Ajar Dasar Fungsi Tekhnis Reserse, Untuk Siswa Pendidikan dan Pembentukan Polri, Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Latian Polri.
- Muladi. 2007. HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Pranadji, Tri. 2008. Aksi Unjuk Rasa Dan Radikalisme Serta Penangananya Dalam Demokrasi Indonesia, Bogor.
- Pranadji, Tri. 2001. Sejarah Demonstrasi Islam, Bandung.

Pulungan. J. Suyuti. 1994. Prinsip Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an, Jakarta.

Qamar, Nurul. 2013. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, sinar garfika, Jakarta timur.

Rahardjo, Satjipto. 2010. Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta.

Rosalina, Iga. 2012. "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat.

Sadjjono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo.

Simorangkir, JCT. 1980. Kamus Hukum, Aksara Baru.

Sitompul, Muhammad. 2019. Peranan Penyelidik Dan Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol. 23, No. 6.

Steers, Richard M. 1999. Efektivitas Organisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudarto. 1981. Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit : Alumni Bandung.

Surbakti, Farrel Eden. 2020. Perbandingan Kedudukan Dan Kewenangan Kepolisian Dalam Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan 51 No. 1.

Sutiyoso, Bambang. 2002. Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 7, No. 4.

Wahyudi, Slamet Tri. 2012. Problematika Penerapan Pidana Mati, Jakarta, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2.

Wadji, Farid. 2021. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 2.

Yuliarso, Kurniawan Kunto. 2015. Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Menuju Democratic Goernance, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 3

2. Referensi Peraturan Perundang-Undangan

KUHAP mengenai hak-hak tersangka, pada hakikatnya adalah pembatasan yuridis bagi Polisi dalam menangani tersangka.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum;

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

3. Referensi Internet dan Wawancara

Dikutip dari <https://isansiabil.wordpress.com/2011/02/15/ham-dan-universal-declaration-of-human-rights/> Pada tanggal 19 September 2022, Pukul 21.00 wib.

Dikutip dari <http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/pada tanggal 19 September 2022, pukul 21.00 Wib.>

Dikutip dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5215533/polisi-amankan-5-pelajar-dari-massa-demo-omnibus-law-di-banyumas>, 10 Oktober 2022, pukul 21.00 Wib.

Dikutip dari <https://portalpurwokerto.pikiran-rakyat.com/banyumas-raya/pr-1155454245/pengemudi-ojek-online-dan-mahasiwa-di-purwokerto-demo-tolak-kenaikan-bbm>, 10 Oktober 2022, pukul 21.00 Wib.

Dikutip dari <http://rechtslaw.blogspot.com>, Teori Hukum Lawrance Meir Friedman, yang diunduh pada hari Selasa, 8 November 2022, pukul 21.00 Wib.

Dikutip dari, <https://banyumaskab.bps.go.id/statictable/2018/02/02/146>, pada tanggal 15 Oktober 2022, pukul 21.00 WIB. Badan Pemeriksaan Sensus Kabupaten Banyumas 2018.

Hasil Wawancara dengan KBO Satuan Samapta Polresta Banyumas Iptu Agung Setiyoko, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, Pukul 09.00 WIB, di Polresta Banyumas.

Hasil Wawancara dengan Kanit Dalmas Satuan Samapta Polresta Banyumas Iptu Sudar, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, Pukul 09.00 WIB, di Polresta Banyumas.

Hasil Wawancara dengan Mahasiswa berinisial D dari salah satu Universitas di Purwokerto, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, Pukul 21.00 WIB, di Kafe Soemarto Space.

penolakan antara “ketertiban” dan “hukum”, oleh karena tuntutan yang masing-masing berbeda. Hukum disini merupakan lambang dari kepastian yang didasarkan pada peraturan, <http://Jurnaldinamikahukum.>, diakses Senin, 22 Agustus 2022, Pukul 13.00 WIB.

Pengertian Hak Asasi Manusia” <http://hedisasrawan.blogspot.com>, diakses pada 19 September 2022, pukul 21.00 wib.

Situs kbpi.web.id, diakses pada tanggal 19 Agustus 2022

Sultan Reynaldi Ponco Wibowo, *Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Era Kepimimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo*, UMY, 2022, https://www.researchgate.net/publication/361525389_SEJARAH_KEPOLISIAN_REPUBLIK_INDONESIA_DAN_ERA_KEPEMIMPINAN_JENDRAL_LISTYO_SIGIT_PRABOWO, di akses pada tanggal 25 September 2022